



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661
(Hunting)
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10110

Nomor : 521/BUA.4/PL.07/19/2021 Jakarta, 20 September 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Kelengkapan data master aset tanah dan bangunan aplikasi SIMAN serta pemutakhiran aplikasi SIMAN pada **Plugin** master aset v3.2.6.0

Kepada Yth.

1. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
 2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
 3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
 4. Para Sekretaris Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah Tingkat Banding;
 5. Para Sekretaris Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah Tingkat Pertama.
- di-
- tempat

Sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Direktur Barang Milik Negara DJKN Kementerian Keuangan RI Nomor S-94/KN/KN.2/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Pemutakhiran Data BMN Berupa Tanah dan Bangunan pada Aplikasi SIMAN **Plugin** Master Aset v3.2.6.0 dan Nomor S-69/KN.2/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Kelengkapan Data Aset Tanah dan Bangunan, dengan ini disampaikan beberapa hal antara lain :

1. Aplikasi SIMAN digunakan untuk kegiatan pengelolaan BMN antara lain terkait dengan penyediaan data Sertipikasi BMN, perencanaan kebutuhan BMN (RKBMN), yang mana dapat diperoleh dari fitur master aset, khususnya tanah dan bangunan. Dengan terpenulunya data tanah dan bangunan yang akurat dan handal serta sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan bertujuan agar Pemerintah dapat secara tepat dan efisien dalam mengambil kebijakan terkait program sertipikasi dan penyelesaian permasalahan terhadap BMN berupa tanah serta kebijakan Pemerintah lainnya seperti Revaluasi, pemeliharaan gedung kantor dan rumah negara, dan lain sebagainya;
2. Berdasarkan data pada aplikasi SIMAN pada fitur master aset pada K/L Mahkamah Agung RI terdapat 3.642 NUP tanah dan 4.206 NUP bangunan, dalam hal kelengkapan foto hanya 51% NUP foto tanah yang dilengkapi dengan foto (1.869 dari 3.642 NUP) dan 83% NUP foto bangunan yang dilengkapi dengan foto (3.476 dari 4.206) ;
3. Dalam rangka kebutuhan pengelolaan BMN, kelengkapan data BMN pada fitur master aset sangat diperlukan baik untuk menjaga kelengkapan dan kebenaran data aset serta mempermudah proses analisa dalam pengelolaan BMN, data yang perlu dilengkapi antara lain :
 - a. Master aset tanah
Kelengkapan detail data tanah, foto, dokumen kepemilikan, batas dan GPS, data bangunan yang dibangun di atasnya, status hukum, dokumen KIB, dan SPM
 - b. Master aset bangunan
Kelengkapan detail data bangunan, foto, dokumen kepemilikan, batas dan GPS, data ruangan, status hukum, dokumen KIB, dokumen asuransi, dan SPM.
4. Untuk membentuk satu database BMN berupa tanah, DJKN Kementerian Keuangan RI telah melakukan update aplikasi SIMAN **Plugin** Master Aset v3.2.6.0, sehingga pembicatan tanah dan luasan masing-masing sesuai sertipikat yang telah terbit dapat diinput pada aplikasi SIMAN **Plugin** Master Aset dengan panduan dapat dilihat pada <http://s.id/PanduanMASertipikasi>.

5. Pemukhiran aplikasi SIMAN *Plugin* Master Aset v3.2.6.0 yang dapat diunduh melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman>.
6. Guna tercapainya pengelolaan HMN yang lebih baik, agar Saudara selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) di satuan kerja dapat memerintahkan Pejabat atau Personil yang menatausahakan dan/atau mengelola Aset serta mengerti tentang aplikasi SIMAN untuk dapat melengkapi data master aset dan memutakhirkan *plugin* master aset sesuai dengan versi terbaru, terutama pada tanah dan bangunan di aplikasi SIMAN. Data master aset ini nantinya secara otomatis juga akan memutakhirkan data BMN pada aplikasi SIPERMARI di Mahkamah Agung RI sebagai sumber data yang digunakan *Stakeholders* baik di internal maupun pihak eksternal Mahkamah Agung RI;
7. Kepada satuan kerja tingkat banding yang menjadi Koordinator Wilayah agar dapat turut serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan data master aset tanah dan bangunan serta pemutakhiran Aplikasi SIMAN *Plugin* Master Aset di wilayahnya masing-masing;
8. Guna pemutakhiran data BMN yang lebih handal khususnya tanah dan bangunan, kiranya perekaman dimaksud telah selesai dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perlengkapan



ROSFIANA, S.II, M.II

NIP. 19640612 198703 2 003

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
4. Direktur Barang Milik Negara DJKN Kementerian Keuangan RI;
5. Para Kepala Bagian pada Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung RI;
6. Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

CEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 10 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4
JAKARTA 10710, KOTAK POS 3186 TELEPON (021) 34831324 FAX, (021) 3448380; SITUS
WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-94/KN/KN.2/2021 23 Agustus 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pemutakhiran Data BMN berupa Tanah dan Bangunan pada aplikasi SIMAN
Plugin Master Aset v3.2.6.0

Yth. Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Kepala/ Wakil Kepala/ Direktur
Keuangan/ Deputi Kementerian Negara/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
(sesuai daftar terlampir)

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun
2004 serta mengamankan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah pada Kementerian/Lembaga,
Pemerintah telah melaksanakan kegiatan percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang
dimulai Tahun 2013, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai surat Direktur Barang Milik Negara a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-9/KN/KN.2/2021 tanggal 16 Februari 2021 hal Identifikasi dan Verifikasi Data Barang Milik Negara Berupa Tanah pada Kementerian/Lembaga, pada intinya menyampaikan agar dilaksanakan Identifikasi dan Verifikasi Data Barang Milik Negara Berupa Tanah pada Kementerian/Lembaga.
2. Identifikasi dan verifikasi dimaksud sangat diperlukan dalam rangka terpenuhinya data tanah yang akurat dan handal serta sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan. Hal ini bertujuan agar Pemerintah dapat secara tepat dan efisien dalam mengambil kebijakan terkait program sertifikasi, pengelolaan Barang Milik Negara, dan penyelesaian permasalahan terhadap Barang Milik Negara berupa tanah.
3. Selanjutnya sesuai surat Direktur Barang Milik Negara Nomor S-69/KN.2/2021 tanggal 10 Juni 2021 hal Kelengkapan Data Master Aset Tanah dan Bangunan pada Aplikasi SIMAN (terlampir), pada intinya agar dilakukan kelengkapan data BMN pada fitur **master aset tanah** berupa kelengkapan detail data tanah, foto, dokumen kepemilikan, batas dan gps, data bangunan yang dibangun di atasnya, status hukum, dokumen KIB, dan SPM dan **master aset bangunan** berupa Kelengkapan detail data bangunan, foto, dokumen, batas dan gps, data ruangan, status hukum, dokumen KIB, dokumen asuransi, dan SPM.
4. Untuk membentuk satu database BMN berupa tanah, kami telah melakukan update aplikasi SIMAN *Plugin Master Aset v3.2.6.0*, sehingga pembedaan tanah dan luasan masing-masing sesuai sertifikat yang telah terbit dapat diinput pada aplikasi SIMAN *Plugin Master Aset* dengan panduan dapat dilihat pada <http://s.id/PanduanMASertifikasi>.
5. Mempertimbangkan hal tersebut di atas, Saudara dapat menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Saudara untuk melakukan:
 - a. pemutakhiran aplikasi SIMAN *Plugin Master Aset v3.2.6.0* yang dapat diunduh melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman>;
 - b. perekaman data BMN sesuai surat Direktur Barang Milik Negara Nomor S-69/KN.2/2021 tanggal 10 Juni 2021 termasuk bidang tanah dan luasan masing-masing sertifikat yang telah terbit.

6. Guna pemutakhiran data BMN yang lebih handal, kiranya perekaman dimaksud telah selesai dilakukan paling lambat tanggal 30 September 2021.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Direktur Barang Milik Negara



Dimandagangkan secara elektronik
Encep Sudarwan

Tembusan:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Lampiran
Surat Direktur a.n. Direktur Jenderal Kekayaan
Negara
Nomor
Tanggal

Daftar Kementerian Negara/Lembaga

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
3. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
4. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
6. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
7. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
8. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia
9. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
12. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum & HAM
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
27. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
28. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
29. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
30. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Barekraf
32. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
33. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional
34. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM
35. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
36. Sekretaris Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi
37. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
38. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
39. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
40. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
41. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama BAPPENAS
42. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
43. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
44. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
45. Asisten Kapolri Bidang Logistik Kepolisian Negara RI
46. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
47. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
48. Sekretaris Utama Kementerian Investasi/BKPM
49. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
50. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
51. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53. Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika



54. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
55. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
58. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
59. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
60. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
61. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
62. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
64. Sekretaris Utama Arsip Nasional
65. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
66. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
68. Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
69. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
70. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
72. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
73. Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
74. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
75. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
76. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan
77. Deputi Bidang Administrasi dan Perencanaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
78. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
79. Deputi Bidang Administrasi Sekretaris Kabinet
80. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
81. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI
82. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI
83. Sekretaris Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
84. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
85. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA, LANTAI 11 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 24,
JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3442930 FAX. (021) 3442948; SITUS WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-69/KN.2/2021 10 Juni 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Kelengkapan Data Master Aset Tanah dan Bangunan pada Aplikasi SIMAN

Yth. (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sebagai aplikasi pendukung pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aplikasi SIMAN digunakan untuk kegiatan pengelolaan BMN antara lain terkait penyediaan kebutuhan data Sertifikasi BMN dan perencanaan kebutuhan BMN (RKBMN). Kebutuhan data dimaksud dapat diperoleh pada fitur master aset, terutama master aset tanah dan master aset bangunan.
2. Dari pemantauan kami pada aplikasi SIMAN fitur master aset, terdapat 545.768 NUP Bangunan dan 133.787 NUP Tanah, dalam hal kelengkapan foto hanya 32% NUP Bangunan yang dilengkapi dengan foto (175.393 dari 545.768 NUP) dan 22% Tanah yang dilengkapi dengan foto (29.674 dari 133.787 NUP).
3. Dalam rangka kebutuhan pengelolaan BMN, kelengkapan data BMN pada fitur master aset sangat diperlukan baik untuk menjaga kelengkapan dan kebenaran data aset serta mempermudah proses analisa dalam pengelolaan BMN, data-data yang perlu dilengkapi antara lain:
 - a. Master aset tanah
Kelengkapan detail data tanah, foto, dokumen kepemilikan, batas dan gps, data bangunan yang dibangun di atasnya, status hukum, dokumen KIB, dan SPM.
 - b. Master aset bangunan
Kelengkapan detail data bangunan, foto, dokumen, batas dan gps, data ruangan, status hukum, dokumen KIB, dokumen asuransi, dan SPM.
4. Guna tercapainya pengelolaan BMN yang lebih baik, kami menghimbau Saudara beserta seluruh satuan kerja untuk dapat segera melengkapi data master aset, terutama pada tanah dan bangunan di aplikasi SIMAN.

5. Terlampir kami sampaikan rekap kelengkapan data master aset tanah dan bangunan berupa foto BMN pada aplikasi SIMAN.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Barang Milik Negara



Ditandatangani secara elektronik
Encep Sudarwan



LAMPIRAN I

Surat Direktur Barang Milik Negara

Nomor : S-69/KN.2/2021

Tanggal : 10 Juni 2021

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
3. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
4. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
5. Kepala Biro Umum, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
6. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Sekretariat
7. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
8. Kepala Biro Perlangkapan, Sekretariat Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI
9. Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
10. Kepala Biro Keuangan dan Aset, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
11. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri
12. Kepala Pusat BMN, Baranahan, Kementerian Pertahanan
13. Kepala Biro Pengelolaan BMN, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum & HAM
14. Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
15. Kepala Biro Umum dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
16. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian
17. Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
18. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
19. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
20. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
21. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama
22. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
23. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial
24. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
26. Kepala Biro Pengelolaan BMN, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
27. Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
28. Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
29. Kepala Biro Umum dan SDM, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
30. Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator Kemaritiman
31. Kepala Biro Umum dan Hukum, Sekretariat/Sekretariat Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32. Kepala Biro Umum dan Keuangan, Sekretariat Kementerian Badan Usaha Milik Negara
33. Kepala Biro Umum dan Keuangan, Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi/Sekretariat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional
34. Kepala Biro Umum dan Keuangan, Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
35. Kepala Biro SDM dan Umum, Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
36. Kepala Biro SDM dan Umum, Sekretariat Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi
37. Kepala Biro Umum, Sekretariat Utama Badan Siber dan Sandi Negara
38. Kepala Biro SDM dan Umum, Sekretariat Utama Badan Intelijen Negara
39. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
40. Kepala Biro Umum, Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik
41. Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama BAPPENAS
42. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
43. Kepala Biro SDM dan Umum, Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional

DAFTAR TUJUAN SURAT

44. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
45. Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi, Kepolisian RI
46. Kepala Biro Pengkajian dan Strategis, Kepolisian RI
47. Kepala Biro Umum dan SDM, Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
48. Kepala Biro Umum, Sekretariat Utama Lembaga Ketahanan Nasional
49. Kepala Biro Umum, Sekretariat Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
50. Kepala Biro Umum, Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional
51. Kepala Biro Keuangan dan dan Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
52. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
53. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
54. Kepala Biro Umum dan SDM, Sekretariat Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
55. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
56. Kepala Biro Umum, Sekretariat Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
57. Kepala Biro Umum, Sekretariat Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
58. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
59. Kepala Biro Umum, Sekretariat Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
60. Kepala Biro Kerjasama Hubungan Masyarakat dan Umum, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
61. Kepala Biro Umum dan Keuangan, Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial
62. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan, Sekretariat Utama Badan Standardisasi Nasional
63. Kepala Biro Organisasi dan Umum, Sekretariat Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
64. Kepala Biro SDM dan Umum, Sekretariat Utama Lembaga Administrasi Negara
65. Kepala Biro Umum, Sekretariat Utama Arsip Nasional RI
66. Kepala Biro Umum, Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara
67. Kepala Biro Umum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
68. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan
69. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
70. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
71. Kepala Biro Umum dan SDM, Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
72. Kepala Biro Keuangan dan Umum, Sekretariat Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
73. Kepala Biro Humas, Sistem Informasi dan Umum, Sekretariat Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
74. Kepala Biro Umum, Sekretariat Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
75. Kepala Biro SDM dan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
76. Sekretaris, Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
77. Kepala Biro SDM dan Umum, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI
78. Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas, Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan
79. Kepala Biro Umum, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
80. Kepala Biro Umum, Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
81. Kepala Biro Umum, Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet
82. Kepala Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
83. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum, Lembaga Penyiaran Publik RRI
84. Direktur Umum, Lembaga Penyiaran Publik TVRI
85. Kepala Biro Umum, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
86. Kepala Biro Sarana dan Prasarana, Sekretariat Utama Badan Keamanan Laut
87. Kepala Biro Umum dan SDM, Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Lampiran II

Surat Direktur Barang Milik Negara

Nomor : S-69/KN.2/2021

Tanggal : 30 Juni 2021

**KELENGKAPAN MASTER ASET TANAH PADA APLIKASI SIMAN
BERUPA FOTO BMN**

Nomor	Kode BA	Nama KI	Total Jumlah NUP	Jumlah NUP yang (Mengikuti Foto)	Persentase Kelengkapan Foto
1	001	MALIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	13	13	100%
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	13	0	0%
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	309	205	66%
4	005	MAHKAMAH AGUNG	3642	1809	51%
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	1780	1157	64%
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	212	7	3%
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	69	25	36%
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	243	221	91%
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	12770	945	7%
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	2265	1402	62%
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	4371	4018	92%
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	3301	837	25%
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	213	107	49%
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	374	83	26%
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	17638	1323	8%
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3141	601	19%
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	745	331	44%
18	025	KEMENTERIAN AGAMA RI	19945	4193	21%
19	026	KEMENTERIAN KELNAGAKERJAAN	72	43	60%
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	173	72	42%
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1837	1151	63%
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	650	419	67%
23	033	KEMENTERIAN PERKULIAHAN, UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	39696	2408	6%
24	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	61	0	0%
25	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	2	0	0%
26	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	276	59	21%
27	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	14	0	0%
28	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBUDAYAAN PEREMPUAN	4	0	0%
29	048	KEMENTERIAN PENYAYAGUNAAN APARATU NEGARA DAN RB	1	0	0%
30	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	52	49	94%
31	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	75	4	5%
32	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1174	893	76%
33	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	45	0	0%
34	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BRN	812	470	58%
35	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	5	2	40%
36	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	607	554	91%
37	060	KEPOLISIAN NEGARA RI	10688	4536	42%
38	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	86	63	66%
39	064	LEMBAGA KEAMANAN NASIONAL	2	2	100%
40	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	4	4	100%
41	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	144	70	49%
42	067	KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI	235	9	4%
43	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	144	107	74%
44	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	581	255	44%
45	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	245	132	54%
46	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	3	3	100%
47	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	15	0	0%
48	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	101	1	1%

Nomor	Kode BA	Nama KL	Total Jumlah NUP	Jumlah NUP yang dilengkapi Foto	Persentase Kelengkapan Foto
49	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	45	35	78%
50	081	BADAN PENELITIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	40	18	45%
51	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	313	43	14%
52	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	5	0	0%
53	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1	0	0%
54	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	29	4	14%
55	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	12	7	62%
56	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	65	33	51%
57	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	300	219	73%
58	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	55	28	51%
59	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	2	0	0%
60	093	KOMISI PEMBENTUKAN KORUPSI	3	3	100%
61	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	18	14	78%
62	100	KOMISI YUDISIAL RI	2	0	0%
63	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	3	2	67%
64	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDO	35	27	77%
65	105	LEMBAGA KEJAJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	2	0	0%
66	107	BADAN NASIONAL PENCAHARIAN DAN PERTOLONGAN	211	174	82%
67	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	1	1	100%
68	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	278	4	1%
69	110	OMBUDSMAN RI	4	0	0%
70	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	2	0	0%
71	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS BATAS	199	8	4%
72	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	1	0	0%
73	115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA	30	4	13%
74	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	327	108	33%
75	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	484	301	62%
76	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG	2420	0	0%
77	119	BADAN KEAMANAN LAUT	21	17	81%

KELENGKAPAN MASTER ASET BANGUNAN PADA APLIKASI SIMAN
BERUPA FOTO BMN

Nomor	Kode BA	Nama KL	Jumlah Total NUP	Jumlah NUP yang dilengkapi foto	Persentase Kelengkapan Foto
1	001	MAJLIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	15	13	87%
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1250	283	22%
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	795	663	87%
4	005	MAHKAMAH AGUNG	4205	3476	83%
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	2938	2377	81%
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	1136	556	49%
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4617	753	16%
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	632	545	88%
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	70806	14330	18%
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	9250	7842	84%
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	5577	5550	95%
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	18358	6854	37%
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	783	635	81%
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1356	651	53%
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	87103	13349	15%
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	17711	3950	22%
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	7801	4756	61%
18	025	KEMENTERIAN AGAMA RI	52850	37544	71%
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	858	608	70%
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	8455	2610	40%
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KHUTANAN	14376	7431	52%
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	7352	5061	69%
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	50859	4941	10%
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	6	5	83%
25	036	KEMENKO BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	2	2	100%
26	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	260	199	77%
27	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	4	3	75%
28	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	2878	1431	50%
29	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	100	57	57%
30	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMERDAYAAN PELEMPUAN	1	1	100%
31	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RB	10	3	30%
32	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	228	208	92%
33	051	BADAN SIBER DAN SARUK NEGARA	139	115	83%
34	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1684	1477	88%
35	055	KEMENTERIAN PPN/RAPPENAS	43	37	86%
36	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	94507	5363	6%
37	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIC INDONESIA	30	21	70%
38	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	746	660	88%
39	060	KEPOLISIAN NEGARA RI	42064	29661	71%
40	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	426	343	81%
41	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	11	29	85%
42	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	20	18	90%
43	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	517	393	76%
44	067	KEMENTERIAN DLSA, POT DAN TRANSMIGRASI	10177	554	6%
45	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	427	387	91%
46	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	23	22	96%
47	075	BADAN METEOROLOGI KUMATOLGI DAN GEOFISIKA	2005	2324	80%
48	076	KOMISI PEMULIHAN UMUM	766	666	87%
49	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	44	29	66%
50	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	17	10	59%
51	079	LEMBAGA ILMU PENGLAJIHAN INDONESIA	1192	417	35%
52	090	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	239	217	91%
53	091	BADAN PENELITIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	322	194	60%

Nomor	Kode BA	Nama KL	Jumlah Total NUP	Jumlah NUP yang dilengkapi foto	Persentase Kelengkapan Foto
54	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	622	559	91%
55	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	462	195	42%
56	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	4	4	100%
57	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	15	13	87%
58	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	137	117	85%
59	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	56	43	77%
60	088	BADAN KEPENGAWAJAN NEGARA	208	171	82%
61	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	442	397	90%
62	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	426	249	58%
63	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	87	47	54%
64	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	19	17	89%
65	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	21	19	90%
66	100	KOMISI YUDISIAL RI	4	4	100%
67	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	8	5	63%
68	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDO	100	78	78%
69	106	LEMBAGA KEBUDAYAAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	1	1	100%
70	107	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	1002	833	83%
71	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	1	1	100%
72	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	419	94	22%
73	110	OMBUUDSMAN RI	2	0	0%
74	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	282	97	34%
75	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS BATAM	1830	395	22%
76	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	62	52	84%
77	115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA	14	4	29%
78	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	1067	817	77%
79	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	1631	1251	77%
80	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG	79	18	23%
81	119	BADAN KEAMANAN LAUT	90	43	48%

TUTORIAL PENGISIAN / *UPDATING DATA*
Tanah & Bangunan



MASTER ASET SIMAN



DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN

2021

**PETUNJUK CARA MELENGKAPI / UPDATE
DATA MASTER ASET TANAH PADA SIMAN**

1. **Login** pada aplikasi SIMAN sesuai user satker yang terdaftar sebagai koordinator UAKPB



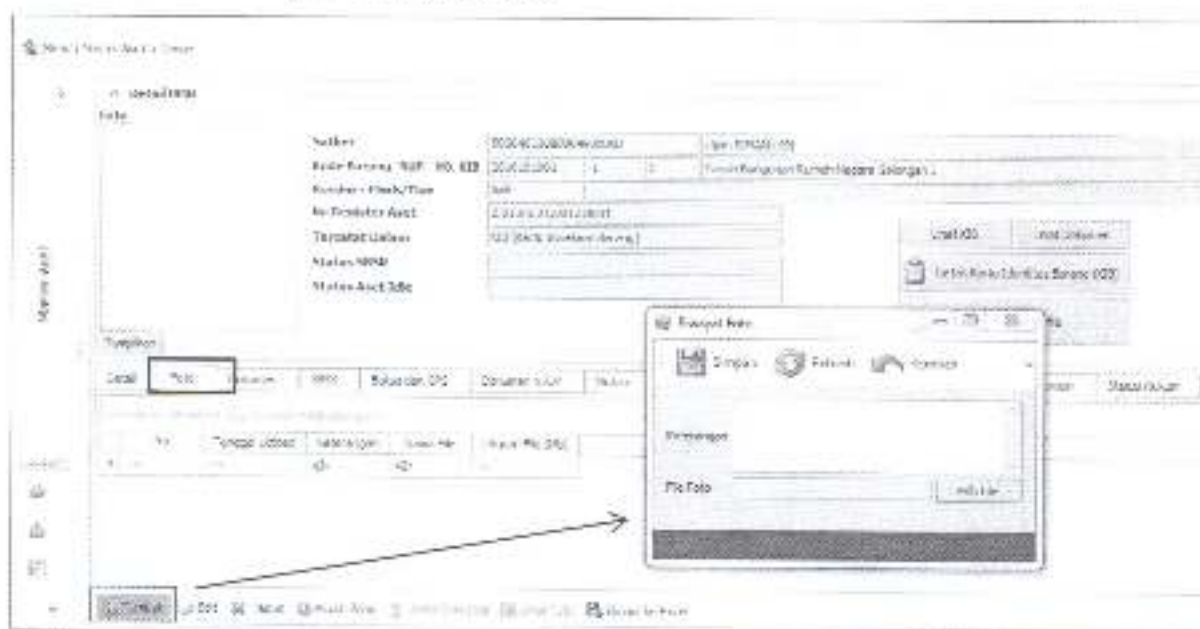
2. Klik **plugin master aset** (Pastikan fitur Master Aset telah menggunakan plugin terbaru yaitu v3.2.5.6 tanggal 29 Maret 2021. Aplikasi SIMAN dan plugin Master Aset dapat diakses melalui tautan <https://www.djkn.kemendagri.go.id/websiman/>)



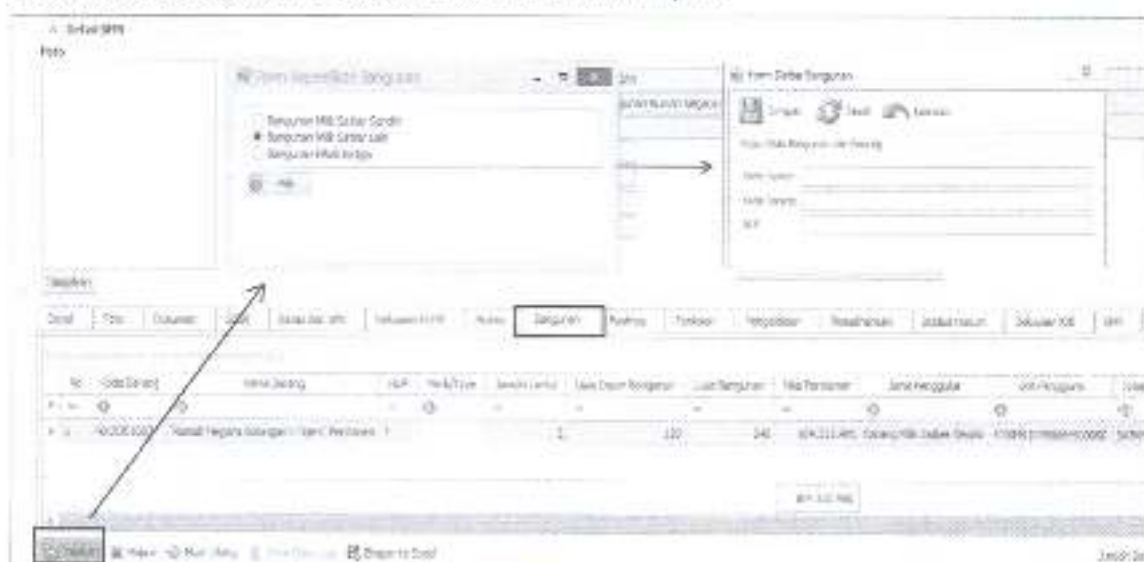
6. Pada tab dokumen, lakukan pengisian data dokumen tanah dengan klik "tambah" untuk mengisi data dokumen tanah, atau "edit" untuk meng-update data dokumen tanah yang sudah ada,

- A. Pengisian form "dokumen kepemilikan", diisi sesuai dokumen kepemilikan tanah terakhir yang ada, dengan kategori dokumen sebagai berikut:
- Bersertipikat atas nama Pemerintah RI c.q K/L (Sertipikat)
Untuk tanah yang sudah bersertipikat atas nama Pemerintah RI c.q. K/L yang menguasai
 - Bersertipikat atas nama K/L (Sertipikat)
Untuk tanah yang sudah bersertipikat namun masih atas nama K/L; K/L c.q Satuan Kerja; maupun atas nama Satuan Kerja
 - Bersertipikat atas nama pihak ketiga (Sertipikat)
Untuk tanah yang sudah bersertipikat namun masih atas nama pihak lain
 - Surat Pelepasan Hak (Tidak Bersertipikat)
 - Akta Jual Beli (Tidak Bersertipikat)
 - Dokumen Pengadaan Tanah (Tidak Bersertipikat)
 - Petok D/Girik/Letter C (Tidak Bersertipikat)
 - Keputusan/Peraturan Desa (Tidak Bersertipikat)
 - Bukti Kepemilikan Lainnya (Tidak Bersertipikat)
Untuk tanah belum bersertipikat dengan dokumen selain poin d s.d h sebagaimana disebutkan diatas.
 - Tidak Ada Dokumen Kepemilikan
Untuk tanah tanpa dokumen

- B. Pengisian form "Jenis Dokumen Kepemilikan" otomatis terisi bila form "Dokumen Kepemilikan" pada poin 6 telah terisi.
- C. Form "Jenis Sertipikat" hanya dapat terisi bila "Dokumen kepemilikan" adalah salah satu dari Bersertipikat a.n Pemerintah RI c.q K/L; Bersertipikat a.n K/L; ataupun Bersertipikat a.n pihak ketiga. Adapun jenis sertipikat yang dapat dipilih sebagai berikut :
- Sertipikat Hak Pakal (SHP)
 - Sertipikat Hak Milik (SHM)
 - Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
- D. "Nomor Dokumen" hanya dapat diinput untuk tanah dengan status dokumen kepemilikan Sertipikat, untuk diisi dengan Nomor Sertipikat dari tanah dimaksud. Nomor dokumen tanah dengan status dokumen kepemilikan selain sertipikat dapat diisi pada form "keterangan".
- E. "Tanggal Dokumen-Berlaku Sampai" hanya dapat dilakukan input untuk tanah dengan status dokumen kepemilikan Sertipikat, untuk diisi dengan tanggal penerbitan sertipikat dan tanggal masa berlakunya (bila ada). Untuk tanggal dokumen dan tanggal masa berlakunya (bila ada) tanah dengan status dokumen kepemilikan selain sertipikat dapat diisi di form "keterangan".
- F. "Atas Nama" diisi dengan nama pemegang hak dari dokumen yang ada.
- G. "Instansi Penerbit" hanya dapat dilakukan input untuk tanah dengan status dokumen kepemilikan sertipikat, untuk diisi dengan Kantor Pertanahan penerbit Sertipikat dimaksud. Untuk instansi penerbit tanah dengan status dokumen kepemilikan selain sertipikat dapat diisi pada form "keterangan".
- H. "Keterangan" dapat diisi dengan penjelasan ataupun informasi lain yang diperlukan terkait tanah.
- I. "Unggah Dokumen" untuk mengunggah file softcopy dari Dokumen Tanah.
- J. Klik simpan bila semua sudah terisi/terupdate.
7. Pada tab foto, lakukan pengunggahan file foto berupa (*.bmp, *.jpg, *.gif, *.png) melalui tombol "tambah" di kiri bawah, pilih file, dan simpan.



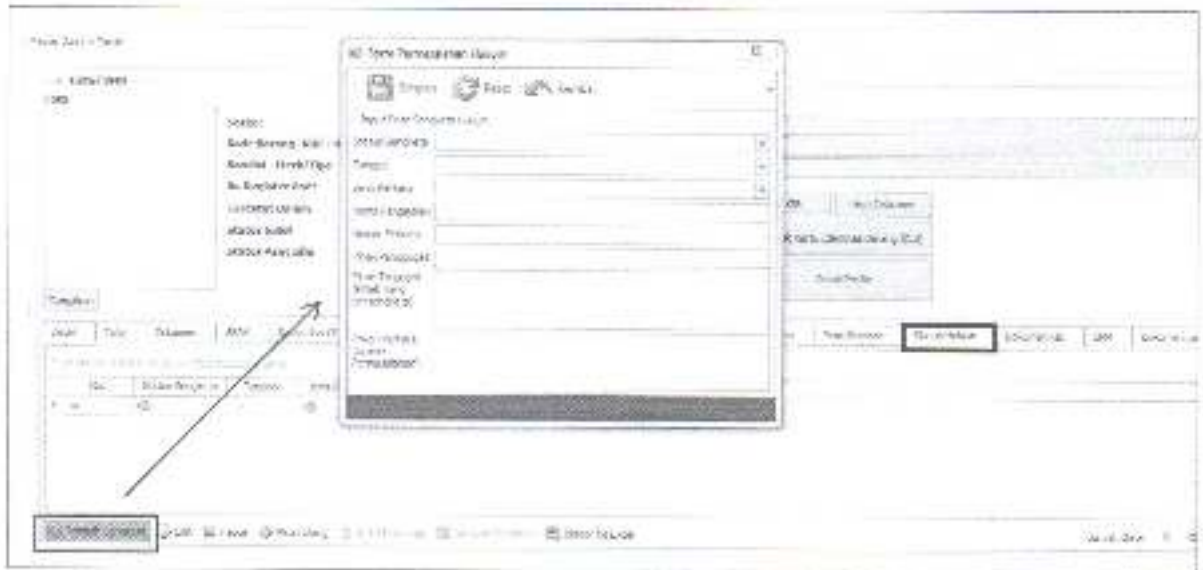
- b) Untuk bangunan milik satker lain, lakukan pengisian form daftar bangunan terkait kode satker, kode barang, & NUP. Setelah selesai diisi klik simpan.



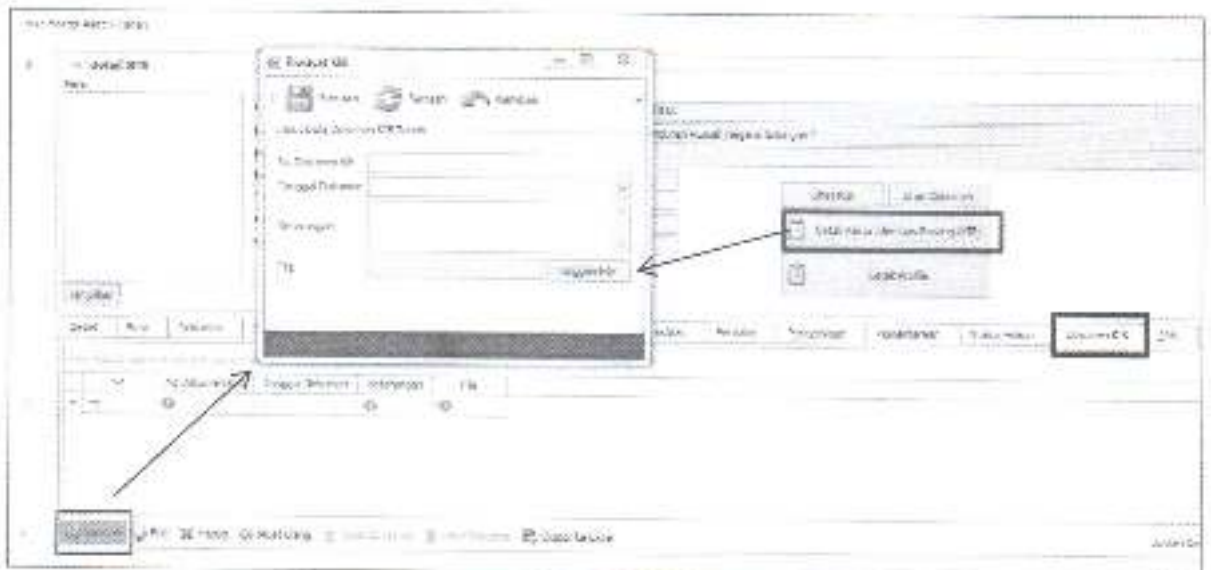
- c) Untuk bangunan milik pihak ketiga, pastikan luas bangunan & luas dasar bangunan sesuai ukuran riil. Setelah selesai diisi klik simpan.



10. Pada tab **status hukum**, lakukan pengisian form hanya apabila terdapat sengketa terhadap tanah tersebut, sedangkan apabila tidak ada sengketa cukup kosongkan form.



11. Pada tab **Dokumen KIB**, lakukan pengisian form No. dokumen s.d unggah file. Adapun file yang diunggah merupakan hasil dari "cetak KIB" yang telah diverifikasi dan di tandatangani Kuasa Pengguna Barang. Setelah semua diisi lalu klik simpan.



12. Pada tab **SPM** lakukan pengisian form atas data SPM Tanah yang bersangkutan dan klik simpan.



**PETUNJUK CARA MELENGKAPI / UPDATE
DATA MASTER ASET BANGUNAN PADA SIMAN**

1. Login pada aplikasi SIMAN sesuai user satker yang terdaftar sebagai koordinator UAKPB



2. Klik plugin master aset (Pastikan fitur Master Aset telah menggunakan plugin terbaru yaitu v3.2.5.6 tanggal 29 Maret 2021. Aplikasi SIMAN dan plugin Master Aset dapat diakses melalui tautan <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman/>)



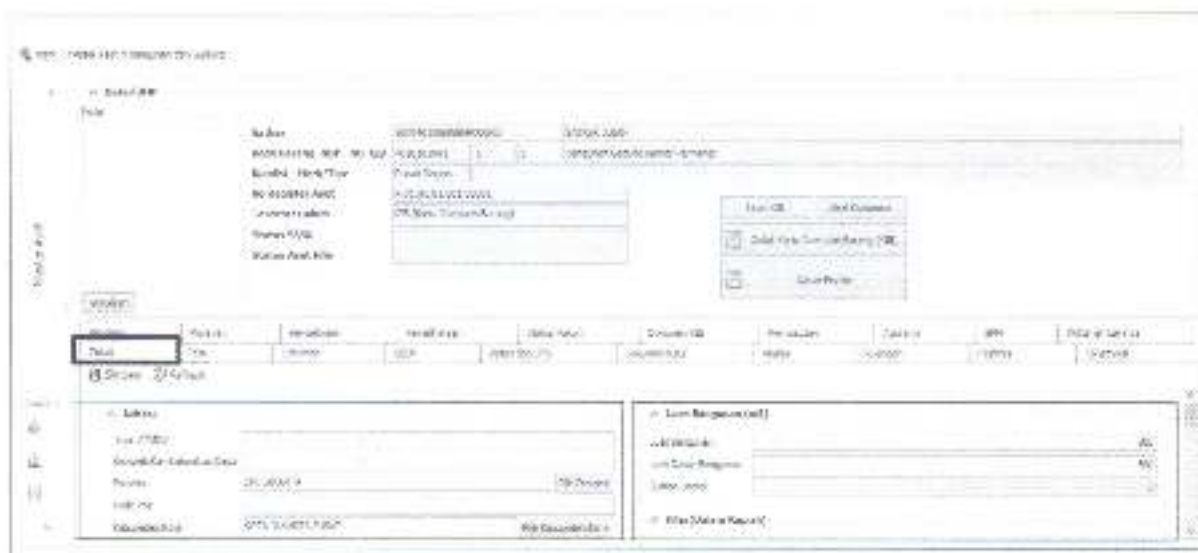
3. Klik menu No (4) "Bangunan Gedung", lalu klik 2x data bangunan yang akan diupdate



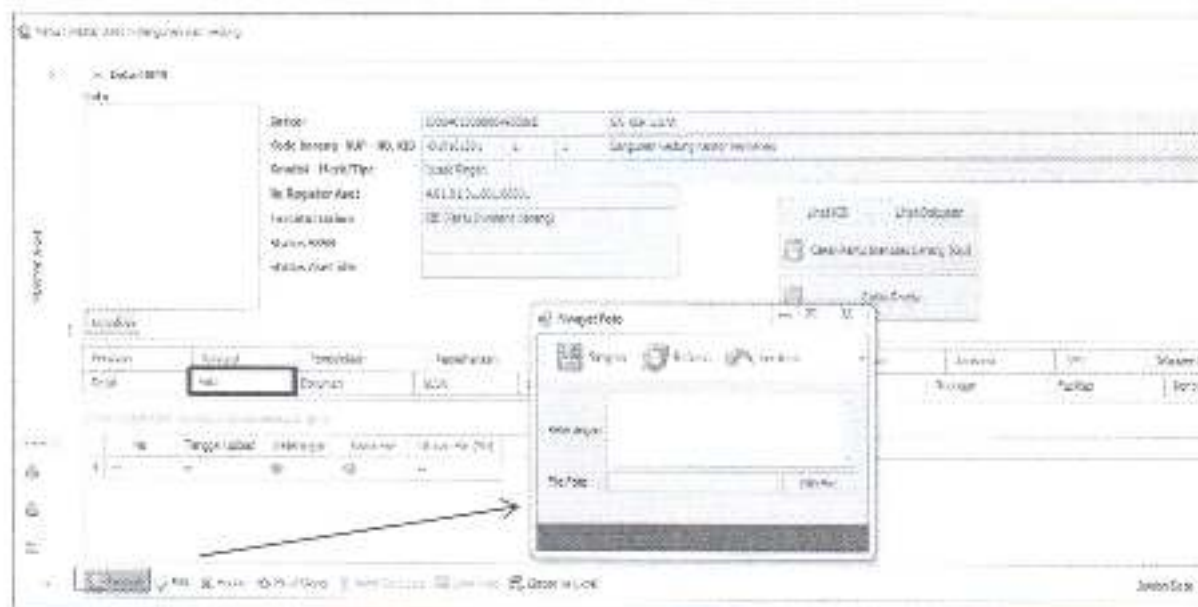
4. Akan muncul beberapa tab seperti detail, foto, dokumen, Batas & GPS, dst. Harap lakukan pengisian data terkait aset bangunan dimaksud pada tab yang telah disediakan.



5. Pada tab detail harap pastikan keterangan lokasi, luas bangunan, dll sudah sesuai. Bila masih terdapat yang belum sesuai / belum terisi dapat langsung dilengkapi pada kolom yang tersedia.



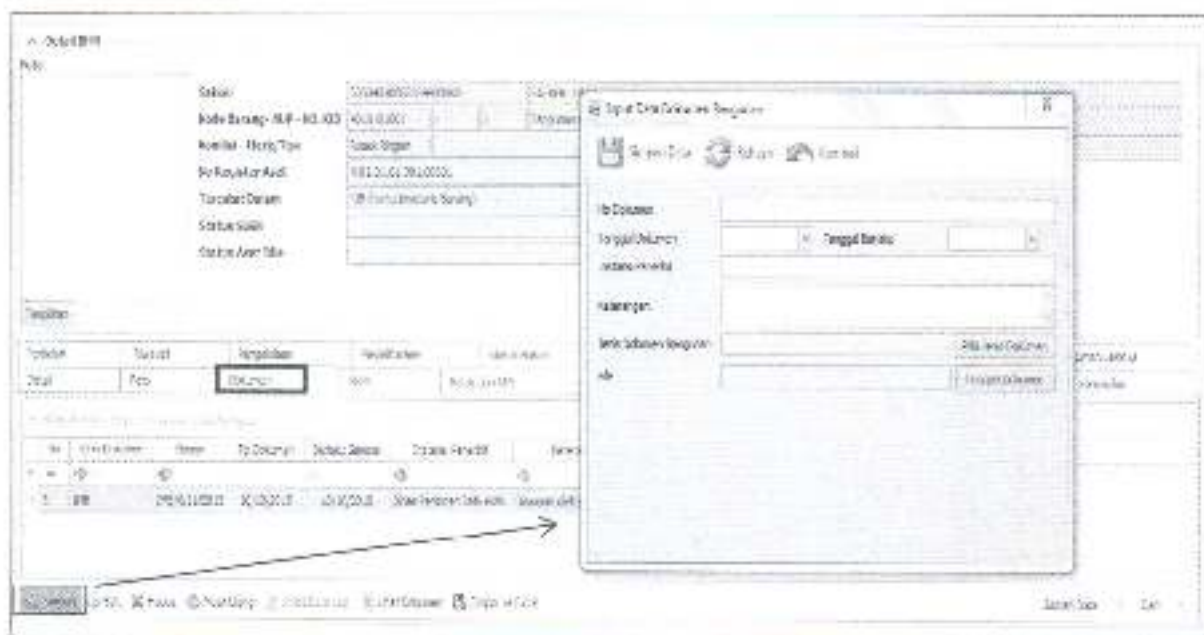
6. Pada tab foto, lakukan pengunggahan file foto berupa (*.bmp, *.jpg, *.gif, *.png) melalui tombol "tambah" di kiri bawah, pilih file, dan simpan.



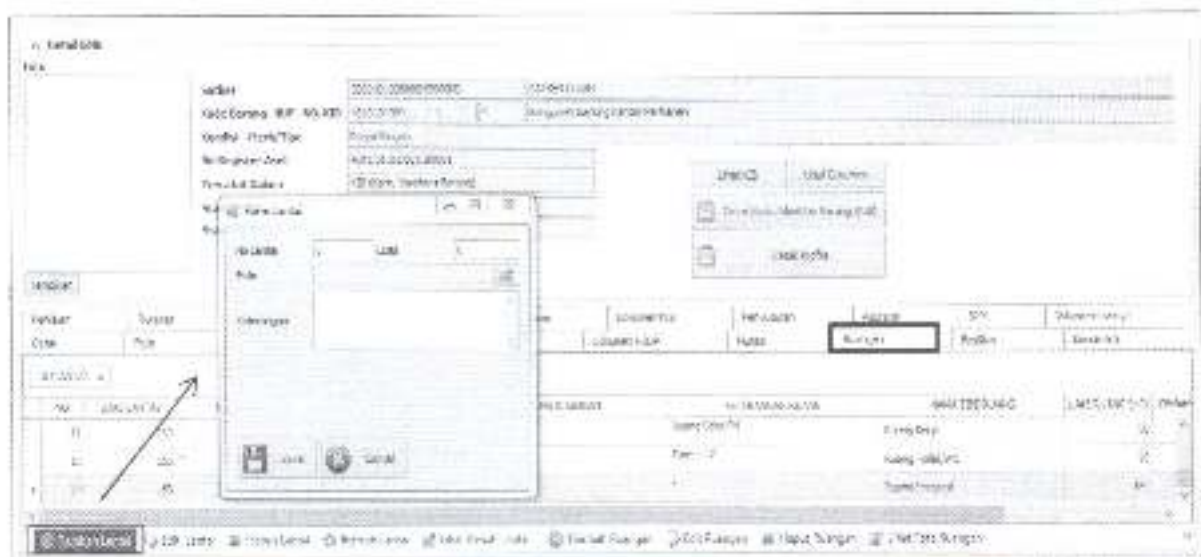
7. Pada tab **Batas & GPS**, lakukan pengisian data pada kolom batas s.d GPS. Pada kolom GPS, isilah data *longitude dan latitude* (bila belum tersedia data tsb harap lakukan pencarian pada *google maps* dan *copy-paste* pada kolom GPS). Setelah selesai diisi klik simpan.



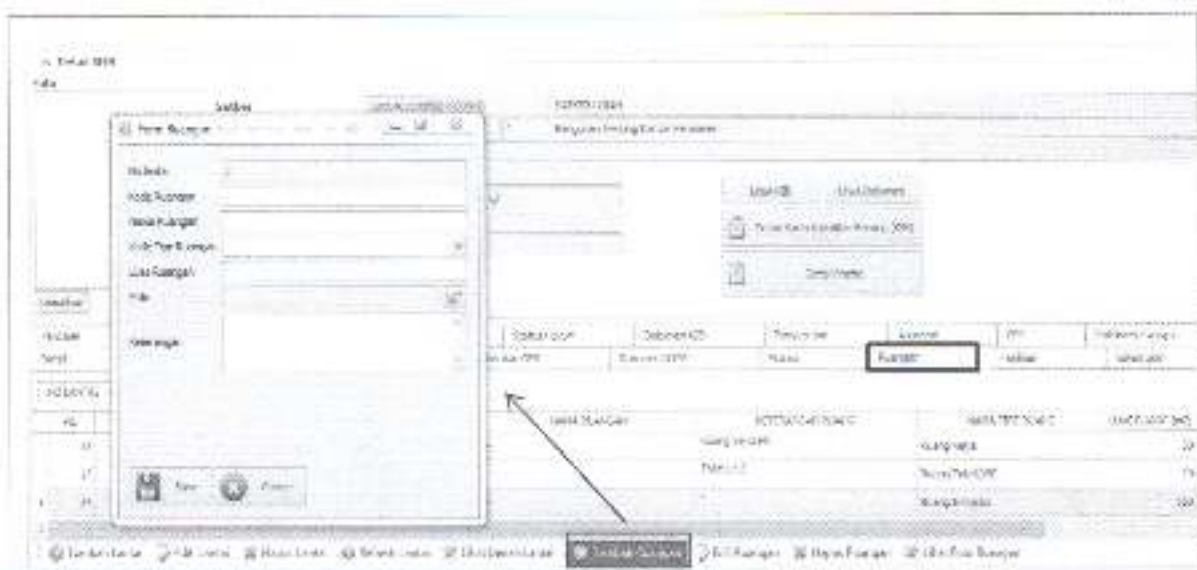
8. Pada tab **dokumen**, lakukan pengisian data dokumen kepemilikan bangunan pada form yang tersedia serta lakukan pengunggahan dokumen kepemilikan berupa file pdf. Apabila sudah selesai klik simpan:



9. Pada tab **ruangan**, lakukan pengisian dengan terlebih dahulu menginput data per lantai, kemudian menginput data per ruangan.
 - a) Input data lantai dilakukan dengan klik tambah lantai kemudian isi form no.lantai, foto, & keterangan, lalu klik simpan.

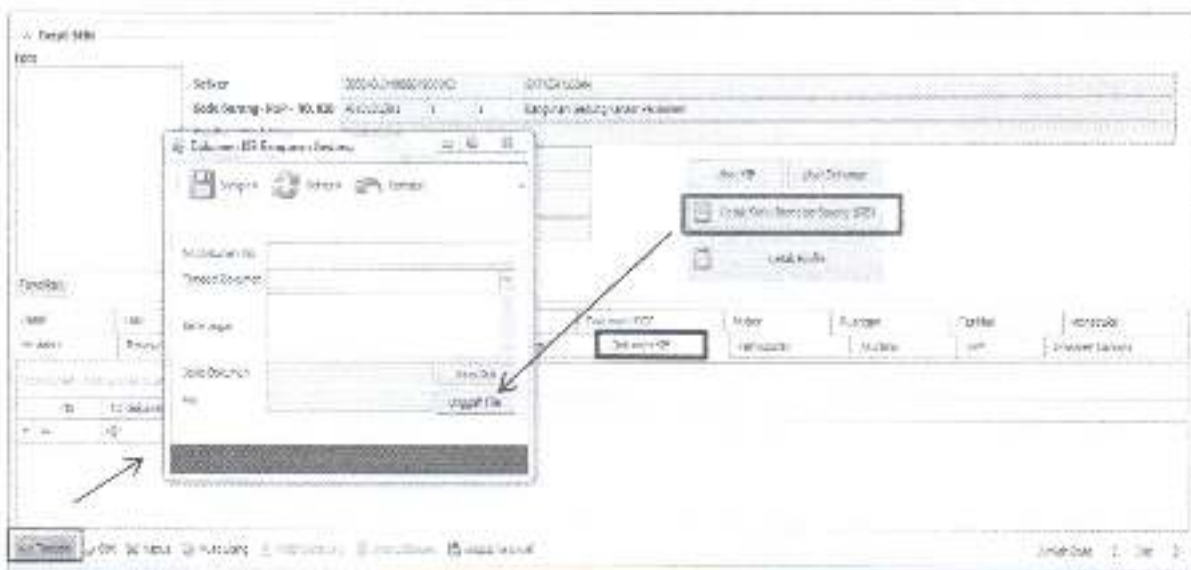


b) Setelah input data rantai, lalu input data ruangan dengan klik tambah ruangan kemudian isi form yang tersedia, dan klik simpan. Data ruangan yang diisi dilakukan per lantai.

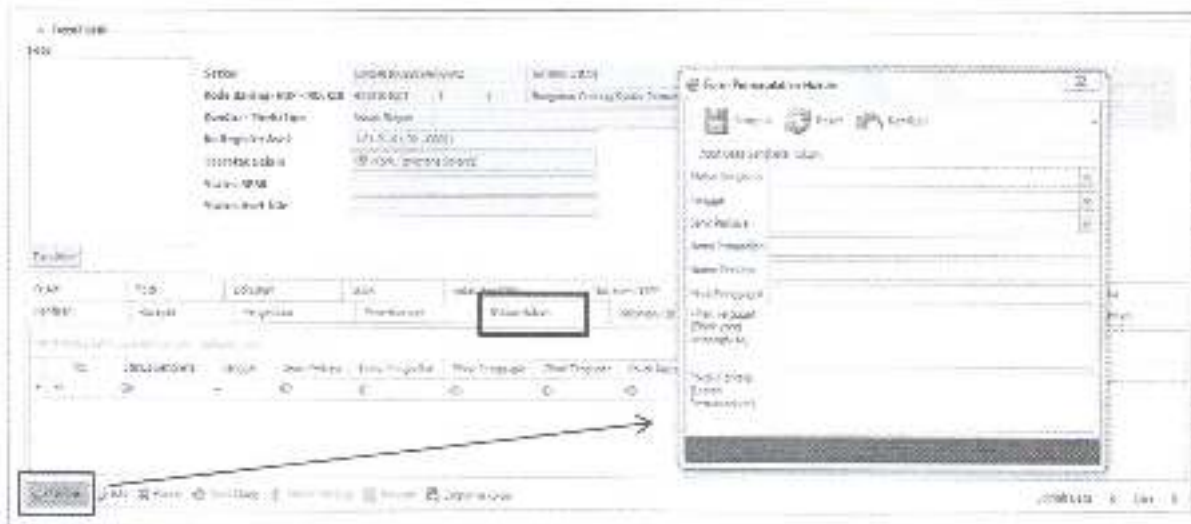


Lakukan langkah ini (input data rantai & data ruangan) satu persatu dan pastikan seluruh data rantai & ruangan telah terekam dalam master aset.

10. Pada tab **Dokumen KIB**, lakukan pengisian form No.dokumen s.d unggah file. Adapun file yang diunggah merupakan hasil dari "cetak KIB" berupa pdf yang telah diverifikasi dan di tandatangani Kuasa Pengguna Barang. Setelah semua diisi lalu klik simpan.



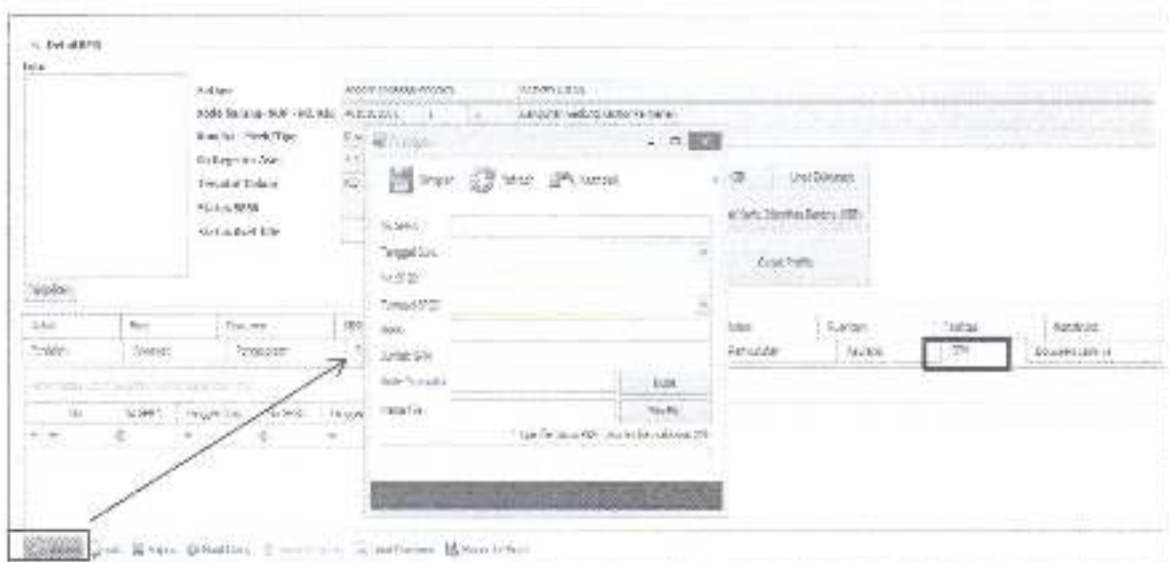
11. Pada tab **status hukum** lakukan pengisian form hanya apabila terdapat sengketa terhadap tanah tersebut, sedangkan apabila tidak ada sengketa cukup kosongkan form.



12. Pada tab **asuransi** lakukan pengisian data asuransi bangunan yang telah diajukan dan telah memperoleh polis asuransi, lalu klik simpan.



13. Pada tab SPM lakukan pengisian form atas data SPM Bangunan yang bersangkutan dan klik simpan.



TERIMA KASIH